

# ISLAM DAN DEMOKRASI DI TUNISIA (Kajian Sejarah dan Politik)

Miftahul Khoiri<sup>1</sup>, Nur Anwar<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah Bangil Pasuruan, Indonesia

<sup>2</sup>Institut Agama Islam Negeri Kediri, Indonesia

<sup>1</sup>techochoir@gmail.com

<sup>2</sup>nuranwarr18@gmail.com

---

DOI: 10.38073/batuthah.v1i2.1056

Received: Juli 2022

Accepted: Agustus 2022

Published: September 2022

---

## Abstract :

Tunisia is a country in the Middle East. Even though they are in the Middle East region which is included in the Arab region, they remain democratic. It all started with the enactment of the jasmine revolution from 2010-2011 which drew the world's attention. Starting from Tunisia, the spirit of revolution which became known as the Arab Spring swept across other Middle Eastern countries. The research study that the author wrote is related to Islam and democracy in Tunisia, to provide an overview of one of the countries in the Arab world which has revolutionized the governance order to become more flexible. In this research study, the historical method was used, which consisted of four stages, namely, finding sources, criticizing, interpreting, and writing. The results of this research study can be said that, Islam and democracy in Tunisia are well developed. This is marked by the existence of a national dialogue when there is a dispute or conflict between groups. When the jasmine revolution occurred in Tunisia which shocked the world, no one would have thought that Tunisia would rise quickly. After carrying out the process of government transition, Tunisia has sped up leaving other Middle Eastern countries in matters of democracy. Tunisia is now the only post-Arab Spring Middle Eastern country that has been able to rise up and implement democratic principles in its country. After the revolution, democratic values were so visible, such as the existence of elections, freedom of opinion, giving space to women, freedom of religion, expression, the emergence of majlis ta'lim Islamic religious studies, the birth of mass organizations is proof that Islam and democracy in Tunisia complement each other.

**Keywords:** History of Islam, Democracy, Politics, Tunisia

## Abstrak :

Tunisia Merupakan negara yang berada di Timur Tengah. Meskipun berada dalam kawasan Timur Tengah yang masuk kawasan arab mereka tetap berdemokrasi. Semua itu berawal dari diberlakukannya revolusi melati dari 2010-2011 yang membuat perhatian mata dunia. Berawal dari Tunisia, semangat revolusi yang kemudian dikenal dengan nama *Arab Spring* melanda kawasan negara Timur Tengah lainnya. Kajian riset yang penulis tulis terkait dengan Islam dan demokrasi di Negara Tunisia ini, untuk memberikan gambaran salah satu negara di arab yang merevolusi tatanan pemerintahan menjadi lebih lentur. Dalam kajian riset ini digunakan metode sejarah yang terdapat empat tahap yakni, pencarian sumber, kritik, interpretasi, serta penulisan. Hasil dari kajian riset ini dapat dikatakan bahwa, Islam dan demokrasi di Tunisia berkembang dengan baik. Hal itu ditandai dengan adanya dialog nasional ketika terjadi perselisihan maupun konflik antar golongan. Ketika terjadi revolusi melati di Tunisia yang menggemparkan dunia, semua tidak akan menyangka bahwa

Tunisia akan bangkit dengan cepat. Setelah melakukan proses transisi pemerintahan, Tunisia melesat meninggalkan negara-negara Timur Tengah lainnya dalam urusan demokrasi. Tunisia kini menjadi satu-satunya negara Timur Tengah pasca *Arab Spring* yang mampu bangkit dan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi di negaranya. Pasca revolusi, nilai-nilai demokrasi begitu terlihat seperti halnya, adanya pemilu, kebebasan berpendapat, memberi ruang terhadap kaum hawa, kebebasan beragama, berekspresi, lahirnya majlis-majlis ta'lim pengajian agama Islam, lahirnya ormas-ormas merupakan bukti bahwa Islam dan demokrasi di Negara Tunisia saling melengkapi satu sama lain.

**Kata Kunci:** Sejarah Islam, Demokrasi, Politik, Tunisia

## PENDAHULUAN

Negara di Timur Tengah yang sejak diberlakukannya revolusi melati dari 2010-2011 telah menarik perhatian dunia. Berawal dari Tunisia, semangat revolusi yang kemudian dikenal dengan nama *Arab Spring* melanda Timur Tengah. Setelah Tunisia, Mesir, Libya, Yaman dan negara-negara di Timur Tengah lainnya juga bergejolak. Pemimpin di negara-negara tersebut ditumbangkan oleh rakyatnya sendiri.<sup>1</sup>

Akan tetapi, pasca terjadinya *Arab Spring*, hingga hari ini, Tunisia adalah negara paling stabil di antara negara-negara lain yang terkena *Arab Spring*. Proses transisi pemerintahan berjalan dengan stabil dan hingga hari ini, Tunisia sudah menyelenggarakan pemilihan umum dua kali pasca revolusi melati. Pertama tahun 2011 dan pemilu kedua dilaksanakan tahun 2019 lalu.

Demokrasi di Tunisia juga berkembang dengan baik. Kuran kebebasan berpendapat dan mengkritik pemerintah dibuka seluas-luasnya. Sesuatu yang dulu menjadi bahan langka. Perempuan diberi kesempatan yang sama dengan lelaki dalam berbagai bidang. Kelompok-kelompok minoritas juga mendapatkan haknya dengan baik. Oleh karena itu, tak heran jika Tunisia menjadi negara muslim di Timur tengah yang layak dicontoh oleh negara Timur Tengah lainnya.<sup>2</sup>

Fenomena uraian di atas tersebut dapat memantik penulis untuk mengembangkan, melanjutkan kajian lebih dalam dan menuliskannya ke dalam sebuah artikel yang memfokuskannya pada beberapa bidang yakni, pertama terkait Selayang pandang Negara Tunisia, kedua terkait pecahnya

<sup>1</sup> Rijal Najamuddin Khairur, *MILITER DALAM TRANSISI DEMOKRASI: Pengalaman Tunisia Dan Mesir* (Jakarta: GRAHA ILMU, 2020), 89.

<sup>2</sup> Ahmad Sahide, *THE ARAB SPRING: Tantangan Dan Harapan Demokratisasi* (Jakarta: KOMPAS, 2019), 78.

revolusi Melati di Negara Tunisia, dan ketiga terkait Nilai-Nilai Demokrasi di Negara Tunisia Pasca Revolusi Melati.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam mengkaji riset terkait Islam dan Demokrasi di Tunisia, penulis mempergunakan jenis riset pustaka, dengan memakai pendekatan dalam penelitian sejarah, yang dalam menggunakan pendekatan sejarah terdapat empat tahap dalam melakukan riset. Pertama terkait pengumpulan data, penulis mengumpulkan buku-buku, artikel jurnal, dan web yang terkait tentang negara Timur Tengah khususnya Tunisia. Kedua, mengkritik bahan-bahan yang sudah penulis dapatkan dari buku, artikel, dan web di internet untuk dikritik dari segi kebenaran tulisan yang sudah tertanam di dalam buku, artikel, dan web tersebut. Ketiga, melakukan analisis ataupun interpretasi yang mendalam terkait apa yang sudah penulis tulis, dan keempat baru penulis menuangkan ke dalam sebuah tulisan.

## **TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Selayang Pandang Potret Negara Tunisia**

Tunisia merupakan sebuah negara yang terletak di Benua Afrika, tepatnya di Afrika Utara. Tunisia merupakan negara muslim yang berada di pesisir laut tengah, berbatasan dengan al-Jazair di barat dan Libya di selatan dan timur. Tunisia menempati posisi geografis strategis sebagai penghubung antara Eropa dan Afrika serta antara bagian Timur dan Bagian Barat dunia Arab. Tunisia memiliki nama resmi *Republik of Tunisia* atau *al-Jumhuriyah at-Tunisiyah*.

Sebagai daerah yang strategis, Tunisia menjadi daerah tujuan para penjajah. Tunisia memiliki sejarah panjang sebagai sebuah wilayah jajahan. Beberapa bangsa tercatat pernah menjajah Tunisia. Sebut saja misalnya Funisia, lalu Romawi, dilanjutkan oleh Vandal, Bizantium, Arab, Turki dan yang terakhir Perancis. Tunisia dihuni oleh suku asli yang disebut suku Berber. *Ifriqiya* adalah nama Tunisia sebelum Islam masuk ke negara ini.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Sirojuddin, *Ensiklopedi Islam 5 Sya-Zun* (Jakarta: PT Ichtisar Baru van Hoeve, 1999), 112.

Islam masuk ke Tunisia sejak abad ke-7 melalui seorang tokoh yang dikenaldengan Sahabat Uqba bin Nafi yang memiliki peran penting dalam proses islamisasi di Tunisia. Seperti Indonesia, masyarakat Tunisia mayoritas memeluk agama Islam.<sup>4</sup> Selain dikuasai oleh bangsa-bangsa lain, sejarah juga mencatat beberapa daulah islam yang pernah berkuasa di Tunisia, seperti Umayyah, Abbasiyah, Aghlabiyyah, Fatimiyah, Ziridiyyah, al-Muwahhidun, Hafsiyyah dan Turki Usmani. Tentu saja, daulah-daulah Islam tersebut saling bergantian menguasai Tunisia. Kekhalifahan Turki Usmani adalah kekhalifahan Islam terakhir yang berkuasa atas Tunisia, sebelum Tunisia berubah menjadi negara republik.<sup>5</sup>

Setelah lama berada di bawah kekuasaan Turki Usmani, Tunisia ditaklukkan oleh Perancis melalui perjanjian bardo tanggal 12 Mei 1881. Perjanjian tersebut menjadikan Tunisia sebagai negara jajahan Perancis. Beberapa hal yang dilakukan oleh Perancis ketika berkuasa di Tunisia di antaranya adalah mengembangkan sistem pertanian modern, pendidikan modern, serta memperbaharui undang-undang pertanahan. Terkait pendidikan modern, lembaga *Aliiance Francaise* dan Gereja Katolik yang mengembangkannya di Tunisia. Lembaga perguruan tinggi Masjid Zaitunah juga mengalami modernisasi di masa ini.<sup>6</sup>

Pada masa penjajahan Perancis, kehidupan politik di Tunisia relatif aman. Walaupun demikian, rakyat Tunisia merasa tidak puas dengan pemerintahan Tunisia yang berada di bawah kaki Perancis.<sup>7</sup> Keinginan untuk menjadi negara merdeka dan bebas dari penjajahan kolonial membuat masyarakat Tunisia bersatu. Tahun 1919, rakyat Tunisia menuntut merdeka dan kebebasan menentukan nasib sendiri. Tentu saja, permintaan tersebut ditentang keras oleh Perancis.<sup>8</sup>

Dari peristiwa tersebut, lahirlah Partai Destour yang dikemudian hari

<sup>4</sup> Heri Ruslan, "Islam Di Tunisia Geliat Keislaman Pascarevolusi," Dalam *Republika*, March 6, 2011.

<sup>5</sup> Muhammad Hanif, "Sejarah Tunisia: Situs Persatuan Pelajar Indonesia Tunisia.," <http://www.angelfire.com/planet/ppitunisia/tunisia/sejarah.htm>, 2011.

<sup>6</sup> Wahyu Anggorowati Dwi, *Kajian Tentang Jatuhnya Kekuasaan Ben Ali Di Tunisia Tahun 2011* (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2014), 34–35.

<sup>7</sup> Ira M Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam Bagian Ke Dua* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1987), 232.

<sup>8</sup> Lapidus, 232.

terpecah menjadi dua, yakni *Old Destour* dan *Neo Destour*. Partai terakhir yang disebut, dipimpin oleh Habib Bourguiba. Dengan partai *Neo Destour*, Habib Bourguiba membakar semangat rakyat Tunisia agar merdeka dan menentang penjajahan Perancis. Pengaruh Bourguiba kian hari semakin mengkhawatirkan karena didukung oleh sebagian besar masyarakat Tunisia. Pemerintah Perancis yang tidak mau mengambil resiko, akhirnya menangkap Bourguiba dan membubarkan partainya.<sup>9</sup>

Bourguiba bebas ketika Jerman dan Italia yang beraliansi di Perang Dunia II menguasai Tunisia dari tahun 1940-1943. Setelah tiga tahun berkuasa di Tunisia, Jerman dan Italia berhasil diusir oleh Amerika dan sekutunya. Tunisia kemudian diserahkan kembali kepada Perancis. Ketika Perancis menguasai Tunisia untuk kedua kalinya, keadaan telah berubah. Bourguiba yang pada masa Jerman dan Italia dibebaskan, telah menyebarkan “virus-virus” nasionalisme kepada bangsa Tunisia yang menyebabkan nasionalisme rakyat Tunisia semakin kuat dan pengaruh Bourguiba tidak tergoyahkan dengan kehadiran Perancis.<sup>10</sup>

Tahun 1950, rakyat Tunisia melawan penjajah Perancis dengan perjuangan fisik. Tentu saja, hal itu tidak terlepas dari pengaruh Bourguiba dengan partai *Neo Destour*nya yang menggaungkan sikap anti kolonialisme. Mendapatkan perlawanan fisik, Perancis tidak tinggal diam. Pemerintah Perancis kemudian melakukan penangkapan terhadap para pemimpin yang melakukan perlawanan. Nama-nama seperti Bourguiba, Mohammad Chenik, dan Salah Ben Youssef dijebloskan ke penjara.<sup>11</sup>

Tampaknya Perancis salah perhitungan Dengan melakukan penangkapan terhadap para pemimpin perlawanan. Sebab, penangkapan tersebut tidak membuat rakyat Tunisia mundur sejenkal pun dari tuntutan untuk merdeka. Sebaliknya, kejadian tersebut dijadikan motivasi atau semangat untuk melakukan perlawanan yang lebih besar lagi. Melihat kondisi Tunisia yang

---

<sup>9</sup> Lapidus, 233.

<sup>10</sup> Venti Nurbaiti, *Transisi Demokrasi Di Tunisia Pasca Arab Spring* (Lampung: Universitas Lampung, 2018), 42.

<sup>11</sup> Shafira Elnanda Yasmine, “Arab Spring: Islam Dalam Gerakan Sosial Dan Demokrasi Timur Tengah,” *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan, Dan Politik* Volume 28, no. Nomor 2 (2016): 88.

semakin tidak kondusif dan mengkhawatirkan, Perancis akhirnya terkesan mengendorkan diri. Setelah lima tahun tidak dapat memadamkan perlawanan rakyat Tunisia, Perancis akhirnya dengan berbesar hati memberikan referendum kepada rakyat Tunisia tahun 1955.<sup>12</sup>

Setahun kemudian, yakni tanggal 20 Maret 1956, Tunisia merdeka dari Perancis. Habib Bourguiba sebagai pemimpin Partai Destour yang memimpin rakyat Tunisia melakukan perlawanan, kemudian menjadi Perdana Menteri. Bourguiba kemudian membentuk lembaga yang bertugas menyusun rancangan undang-undang dasar Tunisia. Lembaga tersebut bernama *National Constituent Assembly*.<sup>13</sup>

Tanggal 25 Juli 1957, Tunisia memutuskan menjadi negara republik dan menggantikan sistem monarki *bey* yang sudah ada sejak sebelum Perancis berkuasa di sana. Oleh karena sudah berubah menjadi negara republik. Bourguiba kemudian menjadi presiden pertama Tunisia pasca penjajahan Perancis. Tanggal 1 Juni 1959, Tunisia memberlakukan undang-undang dasar sendiri.<sup>14</sup>

Tahun 1987, Bourguiba digantikan oleh Zine El Abidine Ben Ali yang sebelumnya menjabat sebagai perdana menteri. Bourguiba dilengserkan dari kursi kepresidenan dengan alasan usia dan kesehatan.<sup>15</sup> Belakangan diketahui bahwa alasan tersebut merupakan alasan yang dibuat-buat oleh Ben Ali.

## **B. Pecahnya Revolusi Melati di Negara Tunisia**

Tahun 2010 akhir, terjadi sebuah peristiwa kecil di Tunisia. Peristiwa tersebut terlihat sepele, yakni seorang pedagang buah dan sayuran yang bunuh diri dengan cara membakar dirinya sendiri di depan kantor walikota. Akan tetapi, peristiwa kecil tersebut berubah menjadi peristiwa besar yang menggegerkan Tunisia, menggoyahkan kursi kepresidenan Ben Ali, mengguncang kestabilan Timur Tengah dan menggegerkan dunia.

---

<sup>12</sup> Achmad Sehabuddin, “Peran Jejaring Sosial Dalam Revolusi Melati Di Tunisia 2010-2011” (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015), 4.

<sup>13</sup> Ahmad Sukandi, “Politik Bourguiba Tentang Hukum Keluarga Di Tunisia (1857-1987),” *Jurnal ASAS* Vol. 8, No. 2 (2016): 114.

<sup>14</sup> Muhammad Agastya ABM, *ARAB SPRING: Badai Revolusi Timur Tengah Yang Penuh Darah* (YOGYAKARTA: IRCiSoD, 2015), 94.

<sup>15</sup> Nurbaiti, *Transisi Demokrasi Di Tunisia Pasca Arab Spring*, 50.

Pedagang buah dan sayuran itu bernama Bouazizi. Ia merupakan pedagang yang telah berjualan buah dan sayuran di Sidi Bouzid selama tujuh tahun lamanya. Saat itu, tanggal 17 Desember 2010, Bouazizi hendak berdagang sayur seperti biasanya, di tempatnya berjualan. Akan tetapi, sebelum sampai ke tempat tujuannya, ia dihadang oleh dua polisi wanita. Dua polisi wanita tersebut merebut buah yang ada di gerobaknya. Ia akhirnya melawan dan bertengkar dengan kedua polisi tersebut. Salah satu polisi yang bernama Hamdi berlaku kasar terhadap Bouazizi dengan mengambil timbangan dan meludahinya di depan banyak orang. Sumber lain mengatakan bahwa polisi tersebut juga menghina ayah Bouazizi.<sup>16</sup>

Bouazizi yang tidak terima atas kejadian tersebut lalu pergi ke kantor Gubernur untuk mengadu. Sayang sekali, niatnya bertepuk sebelah tangan. Gubernur Zidi Bouzid tidak mempedulikannya. Kenyataan tersebut membuatnya kecewa. Ia lalu pulang kembali ke tempatnya berjualan. Pukul 11:30 waktu setempat, Bouazizi datang ke kantor Gubernur dengan membawa dua botol pengencer cat. Ia lalu menyirami tubuhnya dengan pengencer cat tersebut dan membakar dirinya sendiri. Tubuhnya dengan cepat dilalap api. Orang-orang yang melihat mencoba membantu dan memanggil polisi, tetapi polisi tidak kunjung datang. Ambulans yang mengevakuasi Bouazizi dan membawanya ke rumah sakit baru datang satu jam sejak peristiwa tersebut.<sup>17</sup>

Menurut penuturan teman Bouazizi, ia sangat kecewa dengan Gubernur Zidi Bouzid yang tidak mempedulikan protesnya. Apalagi sampai tidak menemuinya. Teman Bouazizi mengatakan kalau Bouazizi ingin melakukan aksi bakar diri. Tentu saja hal itu adalah bentuk ungkapan kemarahannya terhadap pemerintah Tunisia yang dikenal korup dan berlaku sewenang-wenang kepada rakyatnya. Akhirnya, tanpa dapat dicegah oleh siapa pun, Bouazizi membakar dirinya sendiri.

Kabar aksi Bouazizi yang membakar dirinya sendiri karena kecewa terhadap pemerintah Tunisia tersebar dengan cepat dan luas. Masyarakat

---

<sup>16</sup> Apriadi Tambaruka, *Revolusi Timur Tengah: Kejatuhan Para Penguasa Otoriter Di Negara-Negara Timur Tengah* (Yogyakarta: Narasi, 2011), 24.

<sup>17</sup> Tambaruka, 26.

Tunisia yang selama ini tidak berani melawan dan menentang pemerintah mulai memiliki keberanian. Tanggal 18 Desember 2010, terjadi unjuk rasa menentang pemerintah yang berakhir ricuh di Zidi Bouzid. Saking banyaknya pengunjuk rasa, aparat keamanan setempat kuwalahan menghadapi para demonstran.<sup>18</sup>

Demonstran tersebut merupakan awal. Setelahnya, banyak sekali demonstrasi yang digelar oleh rakyat Tunisia di kota-kota Tunisia. Seperti halnya di Kota Sousse, Sfax, Meknasy, dan Gahfsa. Sebagian aksi demonstrasi tersebut berujung bentrokan antara warga Tunisia dan pemerintah.<sup>19</sup>

Keadaan Tunisia semakin genting ketika Ben Ali memperbolehkan aparat keamanan melakukan kekerasan kepada demonstran. Hal itu dilakukan oleh Ben Ali dalam rangka untuk melindungi singgasananya. Parahnya, tidak hanya demonstran yang mendapatkan kekerasan. Para wartawan juga mengalami hal yang sama. Mereka mendapatkan larangan meliput berbagai demonstrasi yang terjadi di kota-kota Tunisia. Bahkan ada wartawan yang dirusak kameranya.

Pemblokiran terhadap media sosial telah dilakukan di negara ini. Hal itu dilakukan agar jumlah demonstran tidak terus bertambah. Ben Ali sadar bahwa media sosial dapat memperkeruh keadaan yang membahayakan kedudukannya. Pandangan Ben Ali tidak salah, diakui atau tidak, media sosial seperti Facebook dan Twitter serta jejaring lainnya memainkan peranan penting dalam demonstrasi menentang kepemimpinannya.<sup>20</sup>

Tanggal 4 Januari 2011, Bouazizi yang martir meninggal dunia. Hadir tidak kurang 5000 rakyat Tunisia yang bersimpati terhadap Bouazizi menghadiri prosesi pemakamannya. Kematian Bouazizi semakin menambah semangat demonstran untuk menggulingkan Ben Ali dari kursi presidennya. Sepuluh hari setelah kematian Bouazizi, masyarakat Tunisia kembali menggelar demonstrasi. Mereka meneriakkan slogan-slogan rasa muak kepada Ben Ali. Melihat protes yang semakin membesar, Ben Ali kemudian

---

<sup>18</sup> Tambaruka, 28.

<sup>19</sup> Kartini Indriana dkk, *AGAMA DAN DEMOKRASI: Munculnya Kekuatan Politik Islam Di Tunisia, Mesir, Dan Libya* (Jakarta: Pustaka Jaya, 2016), 55.

<sup>20</sup> Eni Adjeng Hidayah dan Sri Pare, *Arsitektur Kuno Dan Modern: Tunisia Dan Afrika Utara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 73.

menetapkan kondisi darurat nasional dan menerapkan jam malam di Tunisia.<sup>21</sup>

Ben Ali juga memberi perintah kepada aparat keamanan agar tidak menggunakan senjata api lagi dalam menanggapi para demonstran. Ia juga mengucapkan janji akan segera mundur dari jabatannya, memberi kebebasan politik dan pers. Akan tetapi, semua yang dilakukan Ben Ali sudah tidak mengubah apa pun. Rakyat sudah tidak lagi percaya kepadanya. Rakyat Tunis tetap melanjutkan demonstrasi dan menuntut Ben Ali segera melepaskan jabatannya.

Ben Ali yang sadar posisinya akan segera jatuh, akhirnya melepas jabatannya sebagai Presiden Tunisia yang sudah berkuasa selama 23 tahun lamanya. Ia kemudian melarikan diri dengan pesawat pada Jum'at malam tanggal 14 Januari 2011, tepat 10 hari setelah meninggalnya Bouazizi. Bouazizi kemudian diterima oleh pemerintah Saudi setelah sebelumnya ditolak oleh Presiden Perancis. Dengan mundurnya Ben Ali, maka pintu perubahan besar di Tunisia telah terbuka lebar.<sup>22</sup>

### **C. Nilai-Nilai Demokrasi di Negara Tunisia Pasca Revolusi Melati**

Pasca revolusi melati yang terjadi tahun 2010, Tunisia benar-benar berbenah diri. Tahun 2017, Direktur Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. Dr. Masykuri Abdillah mengatakan bahwa di negara muslim, hanya Indonesia dan Tunisia yang benar-benar demokratis. Hal itu ditandai dengan adanya dialog nasional ketika terjadi perselisihan maupun konflik antar golongan.<sup>23</sup>

Sebagaimana kita ketahui, di masa sebelum revolusi yakni ketika Bourguiba dan Ben Ali berkuasa, Tunisia berada di bawah pemerintahan diktator. Bourguiba misalnya, meski telah melakukan perubahan terhadap Tunisia ke arah modernisasi dan westernisasi, tapi di sisi lain juga menggekan kebebasan rakyatnya. Hal itu tercermin dari beberapa kebijakannya yang bertentangan dengan umat Islam, seperti melarang perempuan memakai jilbab,

<sup>21</sup> Anggorowati Dwi, *Kajian Tentang Jatuhnya Kekuasaan Ben Ali Di Tunisia Tahun 2011*, 81.

<sup>22</sup> Ahmad Sahide, *Gejala Politik Timur Tengah (Dinamika, Konflik, Dan Harapan)* (Yogyakarta: The Phinisi Press, 2017), 69.

<sup>23</sup> Dwi Shintia, "Indonesia Dan Tunisia: Negara Muslim Demokratis Terbaik," *Jawapos.Com*, April 7, 2017.

melarang poligami, dan pemimpin agama dilarang memiliki tanah.<sup>24</sup>

Benar bahwa pada masa Bourguiba, telah dilaksanakan pemilu beberapa kali. Hanya saja, partai yang menjadi peserta pemilu adalah partai PSD seorang. Bourguiba amat berkuasa di Tunisia karena mendominasi seluruh Tunisia. Tahun 1975, ia dinyatakan sebagai presiden Tunisia seumur hidup. 12 tahun setelah ditetapkan menjadi presiden seumur hidup, Bourguiba digulingkan oleh Ben Ali. Ben Ali adalah Perdana Menteri Tunisia saat itu. Ia adalah orang yang berjasa menumpas gerakan fundamentalis Islam di Tunisia bernama *Mouvement de Tendance Islamique (MTI)*.<sup>25</sup>

Ben Ali meng kudeta Bourguiba secara damai melalui tangan-tangan dokter istana yang mengatakan bahwa Bourguiba sudah tua dan tidak dapat melakukan tugas-tugasnya sebagai pemimpin negara. Oleh karena itu, Bourguiba harus diturunkan dan Ben Ali melenggang menjadi Presiden Tunisia dengan mulus tanpa hambatan.

Ketika Bourguiba turun dan digantikan Ben Ali, rakyat Tunisia mendapat harapan. Akan tetapi jauh panggang dari api, kenyataannya lebih menyedihkan. Ben Ali sama dengan Bourguiba. Ia memerintah dengan tangan besi. Kebebasan pers sangat dibatasi pada masa Ben Ali, pelanggaran Hak Asasi Manusia kian bertambah, penggangguran meningkat tajam dan praktik korupsi masif terjadi. Faktor-faktor itulah yang kemudian menggerakkan rakyat untuk melakukan revolusi setelah mendapatkan pemantik aksi bakar diri Bouazizi.

Pasca revolusi, hingga hari ini, Tunisia telah melakukan pemilihan umum secara bebas untuk kedua kalinya. Pemilu pertama, berdasarkan catatan *bbc*, terlaksana tahun 2014 dengan terpilihnya Essebsi sebagai presiden. Pemilu kedua digelar tahun 2018 lalu. Pada pemilu kedua tersebut, Qais Saied keluar sebagai pemenang. Pemilu kedua ini menunjukkan bahwa demokrasi di Tunisia sudah berjalan dengan baik. Apa pasalnya?, Karena Qais Saied ini bukan politisi. Ia maju lewat jalur independen dan kemudian memenangkan pemilu. Tentu saja, hal itu tidak akan terjadi di masa sebelum revolusi. Sebab,

---

<sup>24</sup> Sukandi, "Politik Bourguiba Tentang Hukum Keluarga Di Tunisia (1857-1987)," 101.

<sup>25</sup> Shintia, "Indonesia Dan Tunisia: Negara Muslim Demokratis Terbaik."

pemilu dikendalikan oleh presiden.<sup>26</sup>

Intelektual muda Indonesia Zuhairi Misrawi mengatakan dalam salah satu tulisannya bahwa Tunisia menjadi asa bagi negara-negara muslim di Timur Tengah untuk bangkit dari keterpurukan. Setelah revolusi, pemilu langsung di Tunisia berjalan dengan damai dan kontestasi politik di antara partai-partai politik terus berlangsung secara kompetitif. Monopoli kekuasaan pada individu yang terjadi sebelum revolusi tidak ada lagi. Tidak ada partai tunggal yang menguasai gelanggang politik sendirian. Kini, Partai-partai politik yang ada terus bersaing untuk mendapatkan simpati dari publik.<sup>27</sup>

Zuhairi juga mengamati soal keterlibatan perempuan dalam ranah politik praktis dan menduduki posisi strategis di Tunisia. Revolusi di Tunisia telah membuka mata rakyat Tunisia bahwa perempuan juga harus mendapatkan kedudukan yang sama dengan laki-laki dalam berbagai bidang. Pengekangan terhadap perempuan selama pemerintahan Bourguiba dan Ben Ali dihapuskan.

Dalam catatan Zuhairi, Souad Abderrahim adalah perempuan pertama yang menjabat sebagai Walikota Tunis, Ibu Kota Tunisia. Dalam pemilihan pada tingkat kota, Souad meraih 33,8 persen suara. Untuk memastikan sebagai walikota, Souad harus mendapatkan kemenangan voting dari anggota dewan. Dan dalam proses voting di anggota dewan, ia keluar sebagai pemenang dengan mengalahkan rivalnya Nida Tounis dan Kamil Idir.<sup>28</sup>

Setelah revolusi, Tunisia mengalami banyak perubahan. Ruang politik semakin terbuka bagi siapa saja dan gerakan masyarakat sipil mulai aktif. Terjadi berbagai perubahan mendasar dan besar mengenai kebebasan, antara lain kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi, termasuk kebebasan untuk melakukan kritik terhadap pemerintah.

Kebebasan beragama juga semakin semarak dengan menjamurnya pengajian dan *ta'lim-ta'lim* agama Islam di masjid-masjid besar yang tersebar di seluruh penjuru negeri. Selain itu, ada banyak komunitas dan perkumpulan di Tunisia yang semakin tumbuh seperti festival publik, konferensi hingga

<sup>26</sup> Suhendra, "Tunisia Gelar Pemilihan Umum Bebas Kedua Sejak 'Arab Spring,'" <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-49705742>, 2010.

<sup>27</sup> Zuhairi Misrawi, "Sejarah Baru Demokrasi Tunisia," *Detik.Com*, July 5, 2018.

<sup>28</sup> Sahide, *Gejala Politik Timur Tengah (Dinamika, Konflik, Dan Harapan)*, 83.

kegiatan amal.<sup>29</sup>

Lahir juga organisasi bernama Mouwatana dan Tawassol (kewarganegaraan dan komunikasi). Organisasi ini memiliki tujuan untuk menumbuhkan kesadaran tentang kewarganegaraan dan pengabdian masyarakat. Muncul juga sebuah portal interaktif yang dirancang untuk membantu masyarakat sipil bekerja lebih erat dengan Majelis Konstituen, pada saat masa sidangnya dimulai.<sup>30</sup>

## KESIMPULAN

Islam dan demokrasi di Tunisia berkembang dengan baik. Hal itu ditandai dengan adanya dialog nasional ketika terjadi perselisihan maupun konflik antar golongan. Ketika terjadi revolusi melati di Tunisia yang menggemparkan dunia, semua tidak akan menyangka bahwa Tunisia akan bangkit dengan cepat. Setelah melakukan proses transisi pemerintahan, Tunisia melesat meninggalkan negara-negara Timur Tengah lainnya dalam urusan demokrasi. Tunisia kini menjadi satu-satunya negara Timur Tengah pasca *Arab Spring* yang mampu bangkit dan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi di negaranya.

Pasca revolusi, nilai-nilai demokrasi begitu terlihat seperti halnya, adanya pemilu, kebebasan berpendapat, memberi ruang terhadap kaum hawa, kebebasan beragama, berekpresi, lahirnya majlis-majlis ta'lim pengajian agama Islam, lahirnya ormas-ormas merupakan bukti bahwa Islam dan demokrasi di Negara Tunisia saling melengkapi satu sama lain.

## REFERENSI

- Agastya ABM, Muhammad. *ARAB SPRING: Badai Revolusi Timur Tengah Yang Penuh Darah*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2015.
- Anggorowati Dwi, Wahyu. *Kajian Tentang Jatuhnya Kekuasaan Ben Ali Di Tunisia Tahun 2011*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2014.
- Burdah, Ibnu. *Islam Kontemporer: Revolusi Dan Demokrasi*. Malang: Intrans Publishing, 2014.
- Hanif, Muhammad. "Sejarah Tunisia: Situs Persatuan Pelajar Indonesia Tunisia." <http://www.angelfire.com/planet/ppitunisia/tunisia/sejarah.htm>, 2011.
- Hidayah dan Sri Pare, Eni Adjeng. *Arsitektur Kuno Dan Modern: Tunisia Dan Afrika Utara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Indriana, Kartini, dkk. *AGAMA DAN DEMOKRASI: Munculnya Kekuatan Politik Islam Di Tunisia, Mesir, Dan Libya*. Jakarta: Pustaka Jaya, 2016.

<sup>29</sup> Ibnu Burdah, *Islam Kontemporer: Revolusi Dan Demokrasi* (Malang: Intrans Publishing, 2014), 74.

<sup>30</sup> Indriana, *AGAMA DAN DEMOKRASI: Munculnya Kekuatan Politik Islam Di Tunisia, Mesir, Dan Libya*, 73.

- Khairur, Rijal Najamuddin. *MILITER DALAM TRANSISI DEMOKRASI: Pengalaman Tunisia Dan Mesir*. Jakarta: GRAHA ILMU, 2020.
- Lapidus, Ira M. *Sejarah Sosial Umat Islam Bagian Ke Dua*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1987.
- Misrawi, Zuhairi. "Sejarah Baru Demokrasi Tunisia." *Detik.Com*, July 5, 2018.
- Nurbaiti, Venti. *Transisi Demokrasi Di Tunisia Pasca Arab Spring*. Lampung: Universitas Lampung, 2018.
- Ruslan, Heri. "Islam Di Tunisia Geliat Keislaman Pascarevolusi,." *Dalam Republika*, March 6, 2011.
- Sahide, Ahmad. *Gejala Politik Timur Tengah (Dinamika, Konflik, Dan Harapan)*. Yogyakarta: The Phinisi Press, 2017.
- . *THE ARAB SPRING: Tantangan Dan Harapan Demokratisasi*. Jakarta: KOMPAS, 2019.
- Sehabuddin, Achmad. "Peran Jejaring Sosial Dalam Revolusi Melati Di Tunisia 2010-2011." Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015.
- Shintia, Dwi. "Indonesia Dan Tunisia: Negara Muslim Demokratis Terbaik." *Jawapos.Com*, April 7, 2017.
- Sirojuddin. *Ensiklopedi Islam 5 Sya-Zun*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1999.
- Suhendra. "Tunisia Gelar Pemilihan Umum Bebas Kedua Sejak 'Arab Spring.'" <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-49705742>., 2010.
- Sukandi, Ahmad. "Politik Bourguiba Tentang Hukum Keluarga Di Tunisia (1857-1987)." *Jurnal ASAS* Vol. 8, No. 2 (2016).
- Tambaruka, Apriadi. *Revolusi Timur Tengah: Kejatuhan Para Penguasa Otoriter Di Negara-Negara Timur Tengah*. Yogyakarta: Narasi, 2011.
- Yasmine, Shafira Elnanda. "Arab Spring: Islam Dalam Gerakan Sosial Dan Demokrasi Timur Tengah." *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan, Dan Politik* Volume 28, no. Nomor 2 (2016).